

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat merupakan hak yang dimiliki oleh Narapidana.

Pemberian Pembebasan Bersyarat di Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat tersebut dilakukan pengawasan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkinang berupa pengawasan administratif yaitu membebaskan wajib lapor terhadap Narapidana dan pengawasan lapangan berupa koordinasi langsung antara jaksa dengan kepala desa dan anggota keluarga Narapidana, selain koordinasi dengan kepala desa dan anggota keluarga Narapidana, jaksa juga melakukan koordinasi dengan pihak polsek tempat Narapidana berdomisili.

2. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat, jaksa yang mengawasi mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh jaksa tersebut berupa kendala secara yuridis dan non yuridis. Kendala secara yuridis adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan oleh jaksa terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat. Kemudian kendala

secara non yuridis adalah kendala yang dihadapi pada saat proses pengawasan dilakukan yaitu berupa kurangnya jumlah personel jaksa, anggaran, sarana dan prasarana tidak memadai dan jaksa yang mengawasi tidak dipersenjatai.

B. Saran

1. Seharusnya Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peraturan khusus tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat, agar jaksa memiliki landasan yuridis dalam pengawasan dan agar ada keseragaman pengawasan antara kejaksaan di seluruh Indonesia, sehingga dengan adanya aturan yang khusus mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan Pembebasan Bersyarat maka proses pengawasan yang dilakukan oleh jaksa dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan aturan yang telah ada.
2. Sebaiknya ada anggaran, sarana dan prasarana khusus yang digunakan oleh jaksa untuk melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat. Dengan adanya anggaran terhadap pengawasan Pembebasan Bersyarat maka proses pembinaan Narapidana dapat berjalan dengan baik serta bagi Narapidana yang tidak mempunyai modal untuk mengaplikasikan pembinaan yang didapat selama di Lembaga Pemasyarakatan dapat dibantu berupa pemberian modal terhadap Narapidana tersebut, serta dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai maka bentuk

pengawasan langsung turun ke lapangan dengan mengunjungi rumah Narapidana dapat terlaksana.

3. Mengenai jaksa dipersenjatai menurut penulis hal itu tidak perlu untuk diterapkan, mengingat bahwa penggunaan senjata api di Negara Kesatuan Republik Indonesia dibatasi terhadap masyarakat sipil.

